



Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Motivasi, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan

(Studi Kasus pada Kecamatan Nogosari)

Dira Nadian Salsabila ^{1*}, Yuwita Ariessa Pravasanti ², Desy Nur Pratiwi ³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: diranadian29@gmail.com

Abstract. *This study examines the influence of modernization of the administrative system, motivation, and trust in the government on compliance in paying land and building tax (PBB-P2) in Nogosari District. The population in this study were land and building taxpayers. A sample of 100 respondents was taken using the Slovin formula. This study uses a quantitative approach with primary data collected through a questionnaire. Modernization of the administrative system (X1), motivation (X2), trust in the government (X3) and compliance in paying taxes (Y) are the variables used. In this study, the data were used for descriptive analysis, validity tests, reliability tests, and classical assumption tests. In addition, to test the hypothesis, multiple regression analysis was used for the f test, t test, and coefficient of determination (R2). All of this was done using the SPSS version 25 program. The results of the study, namely modernization of the administrative system (X1), motivation (X2), and trust in the government (X3), had a positive and significant impact on compliance in paying taxes (Y).*

Keywords: *Compliance; Modernization; Motivation; Property Tax; Trust.*

Abstrak. Penelitian ini meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi, motivasi, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Nogosari. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan. Sampel 100 responden diambil dengan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data pimer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Modernisasi sistem administrasi (X1), motivasi (X2), kepercayaan kepada pemerintah (X3) dan kepatuhan membayar pajak (Y) adalah variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini, data digunakan untuk analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Selain itu, untuk menguji hipotesa, digunakan analisis regresi liner berganda untuk uji f, uji t, dan koefisien determinasi (R2). Semua ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil studi, yaitu modernisasi sistem administrasi (X1), motivasi (X2), dan kepercayaan kepada pemerintah (X3), berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak (Y).

Kata kunci: Kepatuhan; Kepercayaan; Modernisasi; Motivasi; Pajak Bumi dan Bangunan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang hingga saat ini masih terus berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan di segala bidang, mulai dari insfrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan kelembagaan pemerintahan. Pajak jadi salah satu sumber pemasukan yang hendak membagikan kedudukan yang sangat berarti untuk pembangunan negeri. Dalam rangka menunjang penerapan pembangunan di wilayah, pemerintah wilayah mempunyai sumber pemasukan yang disebut Pendapatan Asli Wilayah (PAD). PAD ialah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri, salah satunya berasal dari pajak daerah.

Salah satu komponen pajak daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah pungutan daerah yang dikenakan atas bumi serta bangunan sesuai dengan syarat Undang- Undang No 12 Tahun 1994. Peningkatan penerimaan dari Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) bisa dicapai melalui peningkatan kepatuhan para pembayar pajak. Kepatuhan pembayar pajak mengacu pada keadaan di mana wajib pajak secara sukarela, sadar, serta patuh penuhi kewajiban perpajakan mereka dan memakai hak perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia (Nursela et al., 2022). Berikut ini merupakan gambaran kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali selama periode 2021-2024.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Nogosari Tahun 2021-2024.

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2021	2.059.488.249	1.571.528.698	76,3%
2022	2.119.252.659	1.828.064.215	86,26%
2023	-	1.818.761.058	-
2024	2.130.875.264	1.811.910.297	85,03%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali, 2026

Informasi diatas menampilkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terdapat di Kecamatan Nogosari belum menggapai target. Pada tahun 2021 capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 76,3%. Pada tahun 2022 capaian menjadi 86,26%, sehingga mengalami peningkatan sebesar 9,96% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tidak dicantumkan data target, namun realisasi hanya Rp. 1.818.761.058 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2024 capaian sebesar 85,03%, yang berarti mengalami penurunan sebesar 1,23% dibandingkan tahun 2022. Hal ini jelas menggambarkan ada permasalahan pemungutan pajak bumi serta bangunan di Kecamatan Nogosari.

Terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Nogosari. Faktor pertama adalah modernisasi sistem administrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh (Amalia et al., 2024) modernisasi sistem administrasi memudahkan wajib pajak untuk mengakses regulasi perpajakan serta memenuhi tanggung jawab mereka melakukan pembayaran pajak, yang kemudian menumbuhkan keyakinan di kalangan masyarakat pembayaran pajak adalah prosedur yang mudah dan sederhana. Kajian terdahulu yang telah dilakukan (Litawan & Nuratama, 2021); (Hamida & Hasnawati, 2024) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh (Primastiwi & C,

2021); (Widiawati & Utami, 2025) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yaitu motivasi. Wajib pajak yang memiliki alasan yang kuat akan memiliki kecenderungan untuk patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Nasharani & Wahjudi, 2023). Sedangkan penelitian dari (Supriatna, 2022) menunjukkan bahwa motivasi tidak berdampak pada kepatuhan pajak wajib. Sementara itu, Apabila masyarakat percaya bahwa pemerintah mengelola dana pajak secara transparan dan bertanggung jawab, maka keinginan untuk membayar pajak juga meningkat. Tinjauan literatur terdahulu mengindikasikan adanya pengaruh antara kepercayaan terhadap pemerintah dengan kepatuhan (Tricahyani et al., 2025); (Handayani et al., 2024). Namun, temuan yang berbeda terdapat dalam penelitian (Priyanti & Fritriyah, 2024); (Ristamada & Purwatiningsih, 2025) yang tidak menemukan pengaruh antara kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Realisasi target PBB-P2 yang belum tercapai di Kecamatan Nogosari, menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) memainkan peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, wajib membayar pajak bumi dan bangunan harus dipenuhi. Dengan cara ini, jumlah yang diterima oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak tahunan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan (Thian, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Direktorat Jenderal pajak (DJP), kepatuhan adalah suatu tindakan dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa penegakan hukum.

Modernisasi Sistem Administrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sistem administrasi dimodernisasi dalam arti bahwa mereka mempertimbangkan, berpikir, dan bertindak sesuai dengan zaman. Modernisasi dapat didefinisikan sebagai penyempurnaan atau perbaikan dalam layanan yang

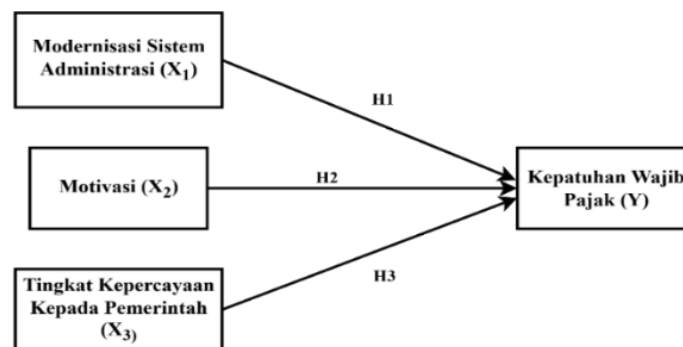
diberikan kepada pihak wajib pajak dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak wajib pajak.

Motivasi

Sesuatu yang diberikan kepada orang lain sehingga mereka tertarik, terpengaruh, atau tertantang untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu disebut motivasi (Duha, 2020).

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk bergantung pada orang lain yang terlibat dalam pertukaran karena mereka percaya pada mereka. negara dan pemerintah, dengan organisasi, kebijakan, dan pejabatnya (Khairudin et al., 2021). Adapun kerangka berpikir tersebut disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

Hipotesis

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Modernisasi sistem administrasi merupakan upaya pembaharuan sistem pelayanan pajak agar lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi, seperti pembayaran online, informasi yang transparan, dan prosedur yang lebih sederhana. Ketika modernisasi sistem administrasi meningkatkan persepsi kemudahan, maka kemauan untuk membayar pajak meningkat dan akhirnya kepatuhan pajak juga meningkat. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktari & Yulita, 2025); (Aryatika & Mildawati, 2021); (Hamida & Hasnawati, 2024) yang menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 = Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Motivasi dalam membayar pajak bisa berupa kesadaran bahwa pajak itu penting, rasa tanggung jawab sebagai warga negara, keinginan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Wajib pajak yang memiliki motivasi tinggi cenderung menunjukkan kesadaran dan keinginan kuat untuk melunasi pajak sesuai tepat waktu, mencegah penunggakan, serta tidak berusaha menghindar dari tanggung jawab perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak dengan motivasi rendah berpotensi menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan ketidakpatuhan. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bangki & Dewi, 2023); (Fikri & Rachmawati, 2024) yang menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 = Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintah mengelola pajak secara jujur, transparan, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, mereka akan lebih termotivasi untuk patuh. Sebaliknya rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan penghindaran pajak, hingga ketidakpatuhan sistematis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh mendukung pernyataan tersebut (Umbaran et al., 2022); (Wirawan & Darmawati, 2024); (Saputra et al., 2023) yang menunjukkan bagaimana kepercayaan kepada pemerintah memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H3 = Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. METODE PENELITIAN

Populasi adalah subjek penelitian yang akan di kaji (Syahza, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar di wilayah Kecamatan Nogosari. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Boyolali, jumlah wajib pajak PBB yang tercatat di Kecamatan Nogosari sebanyak 39.575 wajib pajak. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan sampel. Seratus orang dipilih untuk mewakili populasi penelitian. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Alat penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi digunakan untuk menganalisis data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas

Jika pernyataan dalam kuesioner dapat mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner, kuesioner tersebut dianggap valid. Dalam penelitian ini, uji korelasi pearson product moment digunakan untuk menguji validitas item pernyataan. Dengan asumsi bahwa nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel, item pernyataan dianggap valid. Untuk degree of freedom (df) = n-2, yang merupakan jumlah sampel, perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi (X1).

Item Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Sig $\alpha = 0,05$	Ket.
X1.1	0,693	0,1966	0,05	Valid
X1.2	0,709	0,1966	0,05	Valid
X1.3	0,653	0,1966	0,05	Valid
X1.4	0,733	0,1966	0,05	Valid
X1.5	0,810	0,1966	0,05	Valid
X2.1	0,698	0,1966	0,05	Valid
X2.2	0,775	0,1966	0,05	Valid
X2.3	0,698	0,1966	0,05	Valid
X2.4	0,736	0,1966	0,05	Valid
X2.5	0,747	0,1966	0,05	Valid
X3.1	0,726	0,1966	0,05	Valid
X3.2	0,604	0,1966	0,05	Valid
X3.3	0,649	0,1966	0,05	Valid
X3.4	0,712	0,1966	0,05	Valid
X3.5	0,686	0,1966	0,05	Valid
Y1	0,662	0,1966	0,05	Valid
Y2	0,533	0,1966	0,05	Valid
Y3	0,690	0,1966	0,05	Valid
Y4	0,654	0,1966	0,05	Valid
Y5	0,697	0,1966	0,05	Valid

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 25, 2026

Dari hasil uji validitas terlihat jelas bahwa masing - masing item pernyataan untuk setiap variabel memiliki nilai r-hitung lebih besar dari kriteria r-tabel 0,1966. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk masing-masing variabel valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Menguji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan seberapa konsisten jawaban.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas.

Variabel	Jumlah Item	Kriteria	Cronbach's Alpha	Ket
Modernisasi Sistem Administrasi.	5	0,60	0,765	Reliabel
Motivasi.	5	0,60	0,782	Reliabel
Kepercayaan Kepada Pemerintah.	5	0,60	0,700	Reliabel
Kepatuhan Membayar PBB.	5	0,60	0,757	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 25, 2026

Sebagai hasilnya, tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel dianggap dapat diandalkan dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian, karena nilai reliabel masing-masing lebih besar dari nilai kriteria cronbach's alpha 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov, hipotesis dianggap diterima atau terdistribusi normal jika signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas.

N	Test Statistic	Asymp. Sig	Keterangan
100	0,064	0,200	Normal

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 25, 2026

Tabel 4 menunjukkan nilai Tes Statistik Kolmogrov-Smirnov dengan nilai Asymp. Sig (2 tailed) lebih besar dari 0,05, yaitu 0,200. Data residual memiliki distribusi normal, menurut hasil pengujian ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kesalahan pengganggu (residual) pada satu pengamatan dan pengamatan lainnya dalam model regresi yang digunakan.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi.

N	dU	Durbin-Watson	4-dU	Keterangan
100	1,736	2,102	2,266	Lolos

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 25, 2026

Dengan menggunakan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan durbin-watson, diperoleh nilai 2,102, yang menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif, atau bahwa tidak ada autokorelasi antara variabel independen (lolos).

Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi antara model dan variabel independen (bebas).

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas.

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Modernisasi Sistem Administrasi	0,794	1,260	Tidak terjadi multikolinieritas
Motivasi	0,944	1,060	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,816	1,225	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 25, 2026

Variabel modernisasi sistem administrasi (X1), motivasi (X2), dan kepercayaan kepada pemerintah (X3) memiliki VIF kurang dari 10 seperti yang ditunjukkan dalam tabel 6. Namun, untuk nilai tolerabilitas, semua variabel lebih besar dari 0,1. Jadi, model regresi untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini tidak menunjukkan multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah ada ketidakkonsistenan dalam model regresi dalam hal perbedaan antara residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 7. Hasil Uji Glejser.

Variabel	Sig.	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi	0,188	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Motivasi	0,656	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,649	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 25, 2026

Menurut tabel 7, modernisasi sistem administrasi (X1) memiliki nilai Sig 0,188, motivasi (X2) memiliki nilai Sig 0,656, dan kepercayaan kepada pemerintah memiliki nilai Sig 0,649. Jadi, tidak ada heteroskedastisitas dalam masing-masing variabel penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dilihat dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda.

Variabel	Unstandarlized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	
(Constant)	3,996	1,483	
Modernisasi Sistem Administrasi	0,213	0,059	0,249
Motivasi	0,102	0,048	0,134
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,551	0,061	0,618

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 25, 2026

Tabel 8 di atas menunjukkan persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$\text{Kepatuhan Membayar PBB} = 3,996 + 0,213 \text{ Modernisasi Sistem Administrasi} + 0,102 \text{ Motivasi} + 0,551 \text{ Kepercayaan Kepada Pemerintah} + e$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 3,996 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Modernisasi Sistem Administrasi, Motivasi, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai Kepatuhan Membayar Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 3,996.
2. Koefisien regresi (β_1) nilai Modernisasi Sistem Administrasi sebesar 0,213 menunjukkan bahwa nilai Kepatuhan Membayar Pajak akan meningkat sebesar 0,213 satuan jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Modernisasi Sistem Administrasi mengalami peningkatan sebesar 1.
3. Koefisien regresi (β_2) variabel Motivasi sebesar 0,102 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Motivasi mengalami kenaikan sebesar satu, maka nilai Kepatuhan Membayar Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,102 satuan.
4. Koefisien regresi (β_3) nilai Kepercayaan Kepada Pemerintah sebesar 0,551 menunjukkan bahwa nilai Kepatuhan Membayar Pajak akan meningkat sebesar 0,551 jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Kepercayaan Kepada Pemerintah meningkat sebesar satu.

Uji t

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variabel penelitian, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji t.

Tabel 9. Uji Signifikansi Parsial (Uji t).

Variabel	t	Sig.
Modernisasi Sistem Administrasi	3,588	0,001
Motivasi	2,101	0,038
Kepercayaan Kepada Pemerintah	9,044	0,000

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 25, 2026

Berdasarkan tabel 9 diatas, maka dapat diketahui bahwa:

1. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $3,588 > 1,9847$ dan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H_1 diterima.
2. Variabel Motivasi memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $2,101 > 1,9847$ dan nilai signifikan $0,038 < 0,05$. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H_2 diterima
3. Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $9,044 > 1,9847$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H_3 diterima.

Uji F

Uji kelayakan model regresi dilakukan untuk menentukan relevansinya untuk penggunaan. Model dinyatakan layak jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 (alpha 5%).

Tabel 10. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	329,888	3	109,963	55,364	0,000
	Residual	190,672	96	1,986		
	Total	520,560	99			

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 25, 2026

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap layak untuk digunakan, berdasarkan hasil uji kelayakan model (uji F) yang diperoleh dari tabel Anova, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Uji Koefisien Determinasi

Dengan menggunakan koefisien determinasi, kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen dinilai.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
0,796	0,634	0,622	1,409

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 25, 2026

Tabel 11 di atas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi, yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* untuk model regresi adalah 0,622. Hal ini menunjukkan bahwa variasi kepatuhan membayar PBB sebesar 62,2% ditunjukkan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini memengaruhi 37,8% sisa.

Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Hipotesis 1 (pertama) dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil menunjukkan bahwa nilai Thitung lebih besar daripada nilai Ttabel, dengan nilai 3,588 lebih besar dari pada 1,9847, dan nilai signifikan kurang dari 0,05,

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik sistem administrasi yang diterapkan, seperti kemudahan dalam proses pembayaran, serta akses informasi yang lebih cepat dan transparan akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Dengan adanya kemudahan tersebut, masyarakat tidak lagi merasa terbebani atau kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan pun cenderung meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari (Handayani et al., 2025) yang menyatakan penerapan teknologi seperti pembayaran PBB secara online dan informasi pajak berbasis digital, mempermudah wajib pajak mengakses informasi, serta melakukan pembayaran pajak, kemudahan ini mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, karena prosesnya menjadi lebih cepat dan efisiensi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dari (Oktari & Yulita, 2025); (Aryatika & Mildawati, 2021); (Hamida & Hasnawati, 2024) yang menyatakan bahwa hasil studinya menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil ini juga bertentangan dengan temuan penelitian (Primastiwi & C, 2021); (Widiawati & Utami, 2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan membayar pajak tidak dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi.

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Menurut hasil uji secara parsial, Hipotesis 2 (kedua) penelitian menunjukkan bahwa motivasi berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Nilai Thitung lebih besar dari Ttabel, dengan 2,101 lebih besar dari 1,9847, dan nilai signifikan kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa motivasi berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil ini menunjukkan bahwa dorongan internal maupun eksternal, seperti kesadaran akan pentingnya pajak, sanksi yang berlaku, dan keuntungan yang dirasakan dari pembayaran pajak, dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya motivasi yang kuat, wajib pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dari (Bangki & Dewi, 2023); (Fikri & Rachmawati, 2024); (Nasharani & Wahjudi, 2023) yang menyatakan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Selain itu, temuan ini menentang temuan penelitian dari (Supriatna, 2022) yang menyatakan bahwa dorongan untuk membayar pajak tidak berdampak pada kepatuhan.

Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Hipotesis 3 (ketiga) penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak pada Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji secara parsial mengenai Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $9,044 > 1,9847$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Dalam Hipotesis 3 (ketiga) penelitian ini diterima setelah pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Nogosari.

Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan dan penggunaan pajak, adalah faktor yang memengaruhi kepatuhan. Jika masyarakat percaya bahwa pajak yang mereka bayar digunakan secara transparan dan untuk kepentingan umum, mereka akan lebih siap untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh (Saputra et al., 2023) menemukan bahwa sistem pemerintahan yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Dengan kata lain, semakin banyak kepercayaan kepada pemerintah maka lebih banyak orang yang membayar PBB-P2 (Umbaran et al., 2022); (Wirawan & Darmawati, 2024); (Saputra et al., 2023) menyatakan kepercayaan kepada pemerintah meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hasil ini juga bertentangan dengan temuan penelitian (Priyanti & Fritriyah, 2024); (Ristamada & Purwatiningsih, 2025) yang menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi (X1), motivasi (X2), dan kepercayaan kepada pemerintah (X3) berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Y). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa semakin mudah sistem administrasi yang diterapkan, seperti proses pembayaran yang mudah, akan mendorong masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan lebih Keyakinan publik terhadap pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan dan penggunaan pajak, merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, pemerintah Kecamatan Nogosari diharapkan dapat mempertahankan dan mengoptimalkan modernisasi sistem administrasi PBB-P2 yang telah berjalan dengan baik agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah diharapkan tetap melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB-P2 guna meningkatkan motivasi dan kesadaran wajib pajak. Pemerintah Kecamatan Nogosari diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, jujur, dan terbuka sehingga masyarakat tetap patuh dalam membayar PBB-P2. Agar hasil penelitian dapat lebih berkembang dan berbeda, peneliti selanjutnya harus memasukkan variabel lain yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan tentang pajak, dan kualitas pelayanan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Afrinia, A., Analisa, A., Novianty, N., & Yusri, Y. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(3), 2072–2079. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4474>
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, P. E. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Paduneran. *Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626–1636.
- Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–22.
- Bangki, R., & Dewi, N. (2023). *Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Lasusua*. 1(2), 127–138.
- Duha, T. (2020). *Motivasi Untuk Kinerja*. Deepublish.
- Fikri, C., & Rachmawati, Y. (2024). Pengaruh Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 6(1), 01–12. <https://doi.org/10.52333/jurnalratri.v6i1.588>
- Hamida, E. A., & Hasnawati. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1271–1286. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.422>
- Handayani, F., Sahputra, J., & Waruwu, N. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Era Digital Pada Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4(3), 117–137. <https://doi.org/10.55606/kempper.v4i3.4992>
- Handayani, K. T., Syamsul, & Rosyada, D. (2024). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb

- Di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, Dan Tata Kelola Perusahaan (Jakpt)*, 2(1), 329–339. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/1236>
- Ilma'un, L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Kemenkeu. (2025). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*.
- Khairudin, Aminah, & Soewito. (2021). *Potret Kepercayaan Publik Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*. Cv. Amerta Media.
- Khotmi, H., Astini, Y., & Auliana, R. A. (2025). Pengaruh Good Governance, Motivasi, Dan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Lombok Timur. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.109>
- Litawan, I. K., & Nuratama, I. P. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 252–265. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1812>
- Nasharani, L., & Wahjudi, E. (2023). The Influence Of Tax Knowledge And Taxpayer Motivation On Individual Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness As Mediating Variable (Empirical Study At Kpp Pratama Sidoarjo Utara). *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 4(5), 7458–7470. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Nursela, S., Dasmaran, V., & Sriyani, N. (2022). Sosialisasi Pajak Bumi Bangunan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 143–151. <https://doi.org/10.32509/jmb.v2i2.2350>
- Oktari, A., & Yulita, K. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(8).
- Primastiwi, A., & C, D. R. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46–54. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/map>
- Priyanti, A. D., & Fritriyah. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Desa Saga). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 876–895.
- Ristamada, A. R., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 8(3), 914–923. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1167>
- Saputra, M. T. A., Yanti, & Lasmini, L. (2023). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(24), 443–452. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10432957>
- Supriatna, S. (2022). Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Desa Padamukti Tahun 2017–2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*,

11(1), 541–553.

Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian* (Edisi Revisi). Unri Press.

Thian, A. (2023). *Administrasi Pajak*. Cv Andi Offset.

Tricahyani, J. P., Supheni, I., & Rahayu, D. P. (2025). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 Di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>

Umbaran, I. M. S., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (Sppt), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2283>

Widiawati, D., & Utami, E. S. (2025). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Umkm*. 9(2), 1295–1309.

Wirawan, W. R., & Darmawati, D. (2024). Kontrol Korupsi, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 855–864. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jet.v4i2.20995>